BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan disegala bidang dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara adil dan makmur.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN 1993-1998) telah ditegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah:

> Untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan sprituil, berdasarkan Pancasila, di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang mardeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat, dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang mardeka, bersahabat, tertib dan aman.

Pembangunan nasional pada hakekatnya membangun manusia Indonesia se-utuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berarti peningkatan kualitas manusia Indonesia baik fisik maupun nonfisik, diharapkan mampu menjadi subjek dalam rangka pembangunan sektor lainnya.

Dalam pernyataan tentang pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, terkandung makna esensi yang berarti seluruh warga negara Indonesia berhak dan berkewajiban berpartisipasi dan menikmati pembangunan pada Pemerintahan Orde baru. Wujud nyata pembangunan ini, diimplementasikan melalui tahapan, lazimnya disebut PELITA, sebagai pembangunan jangka pendek (5 tahun), serta jangka menengah (10 tahun) dan jangka panjang (25 th ke atas). Hasil pembangunan ini telah dirasakan oleh seluruh rakyat di Indonesia sampai ke pelosok tanah air.

Secara fisik, pembangunan yang telah dilaksanakan dapat kita rasakan dan kita nikmati, di manapun kita berada. Akan tetapi pembangunan dalam bentuk non fisik yaitu pembangunan mental masih sulit untuk mengukur tingkat keberhasilannya, sebab kian hari terjadi pergeseran nilai yang mengarah kearah materialistis dan individualistis yang ditandai dengan mengendornya semangat tolong menolong, menipisnya kesadaran hukum. Contoh yang dapat diketengahkan di mana seseorang yang kena rampok ataupun kecurian, maka cendrung untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib.

Berdasarkan informasi media cetak dan media visual, tingkat kejahatan semakin meningkat. Peningkatan kejahatan ini berkaitan erat dengan ekonomi, sehingga manusia harus dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan di satu sisi dan uapaya malu di sisi lain. Dalam kaitan tersebut diperlukan kontrol diri baik dari dalam maupun dari luar. Sigmun Freud menyebutkan hal itu, karena kendali super ego yang melemah, antara lain melemahnya kontrol dari luar yaitu masyarakat.

Kontrol dari dalam dan luar manusia itu mempunyai peranan yang sangat menentukan untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan. Dengan kontrol tersebut juga akan mampu menumbuh-kembangkan kendali manusia untuk menangkal kegiatan-kegiatan yang tidak terpuji, seperti pembunuhan, kolusi merugikan masyarakat, atau korupsi dan manifulasi. Upaya strategis dapat dicegah melalui wadah pendidikan.

UU No. 12 Tahun 1995, tentang pemasyarakatan, dalam pasal (5) dijelaskan bahwa sistem pembinaan permasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; (1) pengayoman, (2) persamaan perlakuan dan pelayanan, (3) pendidikan , (4) pem-bimbingan, (5) penghormatan harkat dan martabat bangsa, (6) kehilangan

pendidikan kesadaran bernegara, serta penyuluhan kerohanian dan pendidikan lainnya yang bersifat keterampilan teknis.

Sebagaimana seksi lainnya, Seksi Bimbingan pemesyarakatan membuat rencana pendidikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan tujuan umum Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Rencana kerja itu disusun untuk mendapat persetujuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi pendidikan baik dilihat dari methode, materi maupun biaya yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Rencana inilah yang dijadikan pedoman utama melaksanakan tugas rutin pembinaan Narapidana.

Berdasarkan hasil prasurvey awal September 1997, pada prinsipnya pendidikan bagi Narapidana bertujuan untuk membentengi iman dengan menanamkan nilai-nilai Moral Pancasila dan Agama, sehingga mereka mampu kembali ketengah-tengah masyarakat dalam fitranya sebagai manusia yang baik. Akan tetapi pelaksanaan pendidikan sebagai bagian dari pembinaan Narapidana belum berjalan secara maksimal, hal ini masih ditandai dengan gejala-gejala antara lain:

1. Adanya *mismacth* antara disiplin ilmu yang dimiliki petugas dengan bidang tugas yang diemban, sehingga terdengar keluhan dari beberapa petugas bahwa proses pendidikan yang dilakukan mengalami kesulitan. Kesulitan itu terjadi bila Narapidana yang akan dibina memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari petugas, seperti pidana korupsi.
2. Masih ada petugas Lembaga pemasyarakatan yang menyajikan materi Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama belum sesuai dengan rencana dan jadwal kegiatan. Sedangkan proses penyajian belum sistematis.

3. Masih terdapat adanya petugas menyajikan materi pendidikan secara individu, padahal menurut semestinya dilakukan oleh Tim. Budaya kerja ini akan berpengaruh terhadap proses pencapaian tujuan.
4. Lemahnya kontrol terhadap efektivitas pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang disusun dalam rencana kerja akan mengalami hambatan tertentu.

Gejala-gejala di atas harus diberikan solusi dengan segera, sebab ada sub sistem yang belum berfungsi dengan maksimal. Apabila hal itu diabaikan akan berpengaruh pada pembinaan narapidana yang utuh sebagai proses sistemik. Peristiwa demikian meraik untuk diungkapkan. Oleh karena itu diangkat menjadi bahan penulisan tesis, di samping merupakan pengembangan ilmu kependidikan, dan juga relevan dengan materi administrasi pendidikan. Artinya pendidikan narapidana memerlukan proses perencanaan yang sesuai dengan tujuan pembinaan narapidana, pengorganisasian atas kerjasama dengan pihak tertentu, pelaksanaan yang seuai prosedur dan penggunaan semestinya, serta pengawasan terhadap proses dan hasil sebagai fungsi manajerial dari administrasi pendidikan. Dengan demikian pendidikan yang diberikan kepada narapidana merupakan bagian tersendiri dari bidang garapan administrasi pendidikan.

B. Masalah Penelitian

Pendidikan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki ruang lingkup yang amat kompleks dan permasalahan yang cukup rumit, mulai dari penentuan materi dan penyajian, metode dan alat bantu yang digunakan, evaluasi, hingga efektivitas dan efisiensi merupakan subsistem dalam pengajaran

tersebut. Masing-masing subsistem memiliki masalah sesuai dengan tingkat kepentingannya, akan tetapi semua masalah itu dapat diselesaikan menurut sub-sub tertentu yang pada gilirannya akan menjawab permasalahan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan secara utuh.

Demikian luas dan kompleksnya masalah pendidikan yang dilakukan sebagai bagian pembinaan narapidana, maka perlu dirumuskan masalah penelitian yang berbunyi:

Apakah pendidikan sebagai bagian pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang telah dikelola secara efektif dan efisien?

Permasalahan di atas akan dijabarkan melalui pertanyaan yang menyentuh tentang manajemen pendidikan Narapidana sebagai berikut:

1. Apakah hubungan pihak-pihak yang menangani pendidikan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan pendidikan Narapidana telah **terorganisasikan** dengan baik?
2. Apakah pendidikan yang **direncanakan** tersebut sesuai dengan penilaian kebutuhan Narapidana?
3. Bagaimana **pelaksanaan pendidikan** yang dilakukan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tengerang?
4. Bagaimana **penilaian dan pengawasan** terhadap penyelenggaraan pendidikan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang?

C. Alur Berpikir dan Fokus Penelitian

Pendidikan narapidana merupakan bagian dari pembinaan. Untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi kepentingan narapidana diperlukan manajemen, dalam penelitian ini menggunakan manajemen sistem. Subsistem dari sistem manajemen pendidikan narapidana terdiri dari, pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan.

Dalam pengorganisasian membicarakan hubungan intern (bagian yang menangani pendidikan narapidana) dan hubungan ekstern membicarakan masalah koordinasi antara instansi terkait dalam pendidikan narapidana dengan lembaga pemasyarakatan (bagian yang menangani pendidikan narapidana). Perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan dilakukan bersama dalam pelaksanaan pendidikan narapidana untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Setiap sub dalam sistem pendidikan narapidana, memiliki permasalahan, dan penanggulangan tertentu. Dalam kaitan ini yang amat penting adalah menempatkan petugas narapidana sebagai instruktur yang mengusai bidang tugasnya. Oleh karena itu perlu menerapkan prinsip *"The right man on the right place"*. Hal ini menunjang pelaksanaan pendidikan selain sarana dan prasarana serta sumber belajar, dana, hubungan intern dan ekstern organisasi dalam upaya pelaksanaan pendidikan narapidana secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Pada bagian ini akan diketengahkan alur pikir dan fokus penelitian yang berfungsi sebagai pengarah peneliti untuk melakukan kegiatan lapangan sehubungan dengan keperluan data dan informasi. Secara visual dapat dilihat ilustrasi pada halaman selanjutnya.

MANAJEMEN PEMBINAAN NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TANGERANG

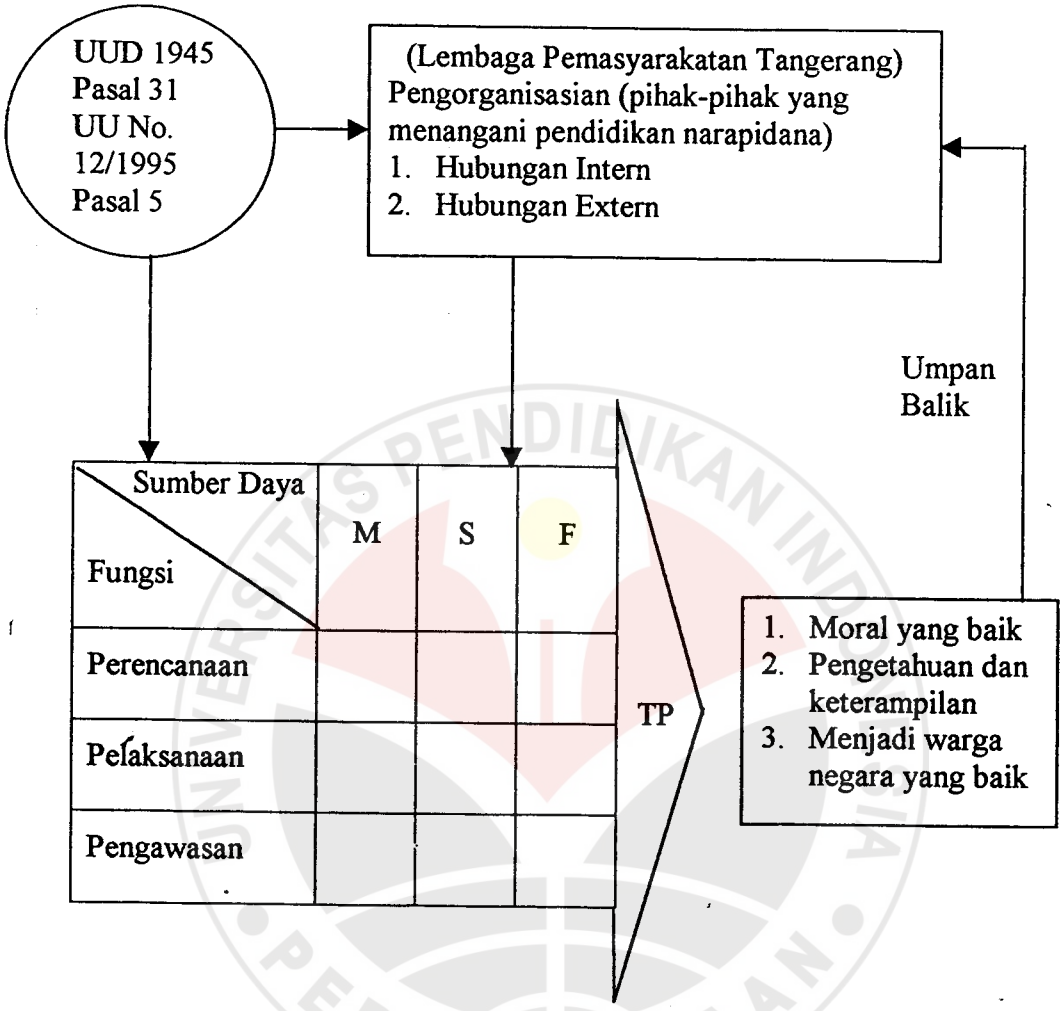

Gambar 1

Keterangan :

M : Manusia, murid (narapidana), tenaga kependidikan, atasan

S : Sumber belajar (Needs, Asessment Narapidana, Perangkat Kurikulum)

F : Fasilitas (sarana dan prasarana, dana)

TP : Tujuan Pendidikan

Pada gambar di atas dapat dijelaskan, bahwa narapidana dalam penelitian ini sebagai masukan, yang kemudian diberikan pendidikan berdasar pada UUD 1945, pasal 31, dinyatakan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran, dan di dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa salah satu fungsi lembaga pemasyarakan adalah mendidik manusia yang dinyatakan telah melanggar hukum.

Sesungguhnya pendidikan narapidana merupakan bagian dari pembinaan, oleh karena itu perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan (manajemen) pendidikan narapidana yang baik akan menempuh beberapa fungsi administrasi pendidikan secara manajerial. Dalam penelitian ini diangkat tentang pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pelaksanaan fungsi manajerial itu akan dilihat melalui metode observasi, wawancara dan penilaian dokumen. Bila semua fungsi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi, maka pendidikan yang diberikan Narapidana akan menghasilkan kualitas moral, iman serta sikap manusiawi yang sesuai dengan tujuan. Disamping menghasilkan kualitas, tentunya diikuti dengan pemakaian sarana dan prasarana yang optimal, serta penggunaan biaya yang sesuai dengan ketentuan anggaran.

Dalam kaitan mengejar tuntutan keluaran yang berkualitas, serta dalam jumlah yang sesuai dengan rencana, maka secara nyata hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran sistem pendidikan di Lembaga tersebut serta memberikan masukan dalam implementasi pelaksanaan pendidikan narapidana di masa yang akan datang. Hal ini dapat dijadikan umpan balik untuk berbuat terbaik bagi peningkatan kinerja petugas Lembaga Pemasyarakatan di Tangerang sebagai

Lapas kelas 1 yang akan menghadapi tantangan tingkat pidana dan perdata yang semakin bervariasi.

D. Tujuan Penelitian dan Keluaran yang diharapkan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran aktual tentang pendidikan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang dalam rangka mengembalikan manusia yang melanggar hukum ke tengah-tengah masyarakat. Gambaran umum itu lebih ditekankan pada manajemen pendidikan Narapidana yang dilihat dari dimensi efektifvitas dan efisiensi.

Tujuan khusus penelitian ini menjawab pertanyaan tentang (1) hubungan pihak-pihak yang menangani pendidikan narapidana di lembaga pemasyarakatan Tangerang dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pendidikan sudah terorganisasikan dengan baik, (2) perencanaan penilaian kebutuhan narapidana, (3) pelaksanaan pendidikan yang dilakukan terhadap narapidana, (4) penilaian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan narapidana.

Sedangkan keluaran yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi baru dan sebagai bahan umpan balik bagi pihak pelaksana pendidikan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemayarakatan Tangerang. Artinya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pembinaan yang akan datang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat disumbangkan penelitian ini bagi Ilmu sosial adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan dengan menyumbangkan buah pikiran

yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan, khususnya di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan manfaat bagi Administrasi Pendidikan, dinyatakan dengan tegas bahwa Administrasi Pendidikan sebenarnya bukan hanya mengeluti pendidikan menurut satuan pendidikan Depdikbud yang dijabarkan dengan panduan UU No. 2/1989, baik PP No. 27, 28, 29,30/1990. Akan tetapi termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan memperkaya khasana keilmuan dalam bidang administrasi pendidikan.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERPUSTAKAAN